
THE INFLUENCE OF ACCOUNTING UNDERSTANDING AND APPLICATION OF REGIONAL FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS ON QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORT WITH HUMAN RESOURCE COMPETENCIES AS MODERATING VARIABLE (EMPIRICAL STUDY OF THE GOVERNMENT PEKANBARU CITY)

PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU)

Elfitayenni^{*1}

Mimelientesa Irman²

Fadrul³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia, Pekanbaru^{1,2,3}

elfitayenni899@gmail.com¹

teshairman@ymail.com²

fadrulwf@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of Accounting Understanding an Application, financial accounting systems human resource competency on the quality of regional financial statement. Based on PP No. 71 year 2010, state and local government financial statement quality have to meet the qualitative characteristic. Factors examined include Accounting understanding, human resource competency financial accounting system and the quality of regional financial statement. The used sampling method is purposive sampling. Data collection is done by giving as many as 90 copies, copies of the questionnaire, which was distributed to respondents who are staff financial in Pekanbaru City. The Data obtained are then analyzed using SPSS 21.00. Based on the analysis results, obtained that applicatin of Accounting and the financial accounting systems have a positive and significant effect to the quality of financial reporting information in OPD Pekanbaru City and human resource competency can be used as a moderating variable.

Keywords : *Understanding of Accounting, Application Financial Accounting System Human Resource Competency and the quality of regional financial statement.*

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk Pmahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai variabel moderating). Dasar dari penelitian ini PP no 71 tahun 2010, Laporan keuangan pemerintah daerah berkualitas harus memenuhi karekteritik laporan keuangan. Variabel yang akan diteliti adalah Pemahaman Akuntansi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan Kualitas laporan Keuangan Daerah. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, pengumpulan data didapat dari penyebaran kuisisioner kepada 90 staff pengelola keuangan di Pemerintah Kota Pekanbaru dan data peroleh dianalisa menggunakan SPSS 21. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa Pemahaman Akuntansi dan Penerapan Sistem informasi keuangan

daerah berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Pemerintah Kota Pekanbaru dimana kompetensi sumber daya manusia, sebagai variabel moderating.

Kata kunci : Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Kompetensi SDM dan Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

1. Pendahuluan

Pemerintah daerah yang menjadi obyek pembahasan pada penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Tingkat II. Sama halnya seperti Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat II mempunyai kewajiban menyelenggarakan atau membuat laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar akuntansi pemerintahan. Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal itu pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sekarang diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan berpedoman pada SAP, maka diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara relevan dan handal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Fenomena yang menjadi sorotan utama saat ini pada organisasi sektor publik di Indonesia adalah tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas lembaga-lembaga publik baik di pusat maupun di daerah. Dalam organisasi pemerintahan, akuntabilitas publik dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pemberian informasi dan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Mardiasmo (2009:87) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut dalam bentuk laporan keuangan.

Menurut Hasil pemeriksaan BPK (IHSP, 2017:94) secara nasional atas 533 Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016, BPK hanya memberikan opini WTP atas 375 (70%) LKPD, opini WDP atas 139 (26%) LKPD, opini TMP atas 23 (4%) LKPD. Secara umum, atas LKPD yang belum memperoleh opini WTP disebabkan masih memiliki kelemahan pada pelaporan keuangan sesuai dengan SAP. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas laporan keuangan interim tidak disusun secara komparatif dengan tahun sebelumnya, pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, terlambat menyampaikan laporan, permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dimana pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja dan pendapatan, serta mekanisme pengelolaan penerimaan tidak sesuai dengan ketentuan, sop tidak ditaat, permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern dimana sop belum disusun/tidak lengkap, satuan pengawas intern tidak optimal dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sdm yang memadai.

Dari hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah kota Pekanbaru, dari tahun 2010-2016

Tabel 1. Opini BPK Laporan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru

Tahun	Opini BPK		
2010	Wajar (WDP)	Dengan	Pengecualian

2011	Wajar (WDP)	Dengan	Pengecualian
2012	Wajar (WDP)	Dengan	Pengecualian
2013	Wajar (WDP)	Dengan	Pengecualian
2014	Wajar (WDP)	Dengan	Pengecualian
2015	Wajar (WDP)	Dengan	Pengecualian
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)		

Sumber : www.pekanbaru.bpk.go.id, 2018

Selama 7 tahun terakhir kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekanbaru sesuai dengan opini BPK hanya tahun 2016 memperoleh opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Kota Pekanbaru. Dari tahun 2010 – 2015, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru. BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan adalah penyajian piutang pajak reklame tidak akurat, nilai piutang retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak dapat diyakini kewajarannya, aset tetap pemerintah kota Pekanbaru pada neraca belum disajikan secara lengkap dan akurat dantanah Hak Pengelolaan (HPL) belum tercatat pada neraca kota Pekanbaru.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 65 Tahun 2010, SIKD memberi manfaat atau kemudahan dalam mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Hal tersebut selaras dengan penelitian Silviana dan Antoni (2014:14) yang memperoleh hasil SIKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian pemanfaatan SIKD dalam proses penyusunan laporan keuangan akan mampu meningkatkan kualitas informasi pada laporan keuangan.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi dan pelaporan akuntansi pemerintah belum dilaksanakan secara optimal, sehingga hal tersebut memiliki pengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai dan memahami tentang ilmu akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah sedangkan menurut Desiana (2014: 7) Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi, sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang-orang yang berkompeten. Hal ini senada dengan penelitian Ihsanti (2014: 4) bahwa laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Dengan kata lain, unsur Pemahaman Akuntansi berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Nasrudin (2010:2), sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai yang tinggi disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu kompetensi SDM merupakan salah satu faktor utama demi terwujudnya output yang berkualitas, dalam hal ini laporan keuangan pemerintah daerah. Terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP, maka perlu diperhatikan kualitas sumber daya manusia yang terlibat

dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, seperti pemahaman akan SAP. Menurut Tuasikal (2012:6) Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka, laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi. Pemahaman terhadap SAP ini diperlukan agar hasil laporan keuangan daerah lebih berkualitas (relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan).

Ketidakhahaman aparatur pemerintah daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjadikan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil pasal 10 yang menyebutkan bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dalam jabatan. Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari Pemahaman Akuntansi di dalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya adalah sistem akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 64 Tahun 2013)

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kompetensi sumber daya manusia pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Pekanbaru (2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan sistem informasi keuangan daerah terhadap kompetensi sumber daya manusia pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Pekanbaru (3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan antara pemahaman akuntansi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Pekanbaru (4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan antara penerapan sistem informasi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Pekanbaru

2. Tinjauan Pustaka

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas (Fauzia, 2014;89).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, pengertian laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat dan Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 pada lampiran II paragraf 51 dan 52, mengatakan bahwa Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 pada lampiran II paragraf 50, mengatakan laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi

yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

Tabel 2. Perbedaan Komponen Laporan Keuangan Menurut PP No.24/2005 dengan PP No.71/2010

PP No.24 Tahun 2005	PP No.71 Tahun 2010
Komponen Laporan Keuangan Pokok:	Komponen Laporan Keuangan Pokok:
1. Neraca	A. Laporan Anggaran:
2. Laporan Realisasi Anggaran	1. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Arus Kas	2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
4. Catatan Atas Laporan Keuangan	
Laporan yang bersifat optional:	B. Laporan Finansial
1. Laporan Kinerja Keuangan	1. Neraca
2. Laporan Perubahan Ekuitas	2. Laporan Operasional
	3. Laporan Arus Kas
	4. Laporan Perubahan Ekuitas
	5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Sumber: PP No.71 Tahun 2010

Berdasarkan Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Laporan Keuangan yang dihasilkan dalam SAP Berbasis Akrua adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Tujuan laporan keuangan sektor publik menurut Mardiasmo (2008), yaitu (a) Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*): Laporan keuangan digunakan dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. (b) Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*): Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, serta membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, dan memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya organisasi.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (a) Relevan (b) Andal (c) Dapat dibandingkan (d) Dapat dipahami

Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah (a) Kepatuhan dan Pengelolaan Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otorisasi penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang ditetapkan. (b) Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif: Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. (c) Perencanaan dan Informasi Otorisasi Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. (d) Kelangsungan Organisasi: Laporan keuangan

berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang. (e) Hubungan Masyarakat : Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. (f) Sumber fakta dan gambaran : Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dalam lingkungan perusahaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, pada awalnya hanya ada 2 jenis definisi kompetensi yang berkembang pesat menurut Hutapea dan Thoha (2008:3) yaitu : (a) Kompetensi yang didefinisikan sebagai gambaran tentang apa yang harus diketahui atau dilakukan agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik (Miller, Rankin and Neathey, 2001:59). Pengertian kompetensi jenis ini dikenal dengan nama Kompetensi Teknis atau Fungsional (*Technical/ Functional Competency*) atau dapat juga disebut dengan istilah *Hard Skills/Hard Competency* (kompetensi keras). Kompetensi jenis ini bermula dan berkembang di Inggris dan banyak digunakan di Negara-negara Eropa dan di Negara-negara Commonwealth. Kompetensi teknis adalah pada pekerjaan, yaitu untuk menggambarkan tanggungjawab, tantangan, dan sasaran kerja yang harus dilakukan atau dicapai oleh si pemangku jabatan agar si pemangku jabatan dapat berprestasi dengan baik. (b) Kompetensi yang menggambarkan bagaimana seseorang diharapkan berperilaku agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Pengertian kompetensi jenis ini dikenal dengan nama Kompetensi Perilaku (*Behavioural Competencies*) atau dapat juga disebut dengan istilah Kompetensi Lunak (*Soft skills/Soft competency*). Perlu diketahui di sini bahwa perilaku merupakan suatu tindakan (*action*) sehingga kompetensi perilaku akan teridentifikasi apabila seseorang memeragakannya dalam melakukan pekerjaan.

Menurut Mitrani dalam Usmara (2012:109) mengemukakan bahwa kompetensi adalah bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Ada lima karakteristik kompetensi, yaitu sebagai berikut (a) motif (*Motive*), apa yang secara konsisten dipikirkan atau keinginan-keinginan yang menyebabkan melakukan tindakan. Apa yang mendorong perilaku mengarah dan dipilih terhadap kegiatan atau tujuan tertentu. Contoh motif berprestasi akan memotivasi orang-orang secara terus menerus untuk merancang tujuan yang cukup menantang serta mengambil tanggung jawab atas pekerjaannya dan menggunakan umpan balik untuk menjadi lebih baik. (b) Sifat/ciri bawaan (*Trait*), ciri fisik dan reaksi-reaksi yang bersifat konsisten terhadap situasi atau informasi. Contoh, reaksi waktu, luas pandangan yang baik merupakan kompetensi bagi seorang pilot. (c) Konsep diri (*Self concept*), sikap, nilai atau *self image* dari orang-orang. Contoh, percaya diri (*self confidence*), keyakinan bahwa ia akan efektif dalam berbagai situasi, merupakan bagian dari konsep dirinya. (d) Pengetahuan (*Knowledge*), yaitu suatu informasi yang dimiliki seseorang khususnya pada bidang spesifik. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Biasanya tes pengetahuan mengukur kemampuan untuk memilih jawaban yang paling benar, tetapi tidak bisa melihat apakah seseorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya itu. (e) Keterampilan (*Skill*), kemampuan untuk mampu melaksanakan tugas-tugas fisik dan mental tertentu. Contohnya seorang dokter gigi memiliki kemampuan menambal dan mencabut gigi tanpa merusak syaraf. Atau seorang programmer komputer memiliki kemampuan mengorganisasikan 50.000 kode dalam logika yang sekuensial (*skill competencies*) relatif lebih mudah untuk dikembangkan dan program pelatihan adalah cara yang paling efektif untuk menjamin kemampuan karyawan.

Manopo (2011:90) Menyatakan manfaat kompetensi sebagai berikut (a) Manfaat proses seleksi berbasis kompetensi (Menyediakan gambaran yang jelas

mengenai persyaratan jabatan, meningkatkan kemungkinan orang-orang yang direkrut akan sukses dalam pekerjaannya, meminimalkan biaya investasi atas merekrut orang-orang yang ternyata tidak memenuhi harapan perusahaan, memastikan proses wawancara yang lebih sistematis) (b) Manfaat pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi (menjadikan organisasi untuk fokus pada perilaku dan keterampilan yang relevan, memastikan keterkaitan pelatihan dan pengembangan,, menjadikan kegiatan pelatihan dan pengembangan lebih efektif, menyediakan kerangka bagi atasan untuk melakukan bimbingan. (c) Manfaat sistem manajemen kinerja yang berbasis kompetensi (menyediakan pemahaman mengenai apa yang akan dimonitor dan diukur, memberi fokus dan memfasilitasi diskusi atas penilaian kinerja. (d) Manfaat sistem perencanaan karier berbasis kompetensi (mengklarifikasikan keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik yang diperlukan, menyediakan metode untuk mengukur kesiapan calon karyawan yang akan dipromosikan, fokus pada rencana pelatihan dan pengembangan pada kompetensi yang perlu dikembangkan)

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

Mardiasmo (2008) mengatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan menurut PP No. 71 Tahun 2010 yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, maka dengan kata lain Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan suatu syarat yang mempunyai kekuatan hukum didalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Noerdiawan (2009) mengatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintahan baik di pemerintah pusat dan departemen- departemennya, ataupun pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diyakini akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. Menurut PP No. 71 seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dapat mengimplementasikan SAP dengan baik sehingga laporan keuangan pemerintah dapat memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada berbagai pihak dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam SAP mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah. Maka dari itu, SAP merupakan persyaratan sekaligus menjadi pedoman yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terdiri dari :

PSAP No. 01	tentang Penyajian laporan Keuangan
PSAP No. 02	tentang Laporan Realisasi Anggaran
PSAP No. 03	tentang Laporan Arus Kas
PSAP No. 04	tentang Catatan atas Laporan Keuangan
PASP No. 05	tentang Akuntansi Persediaan
PSAP No. 06	tentang Akuntansi Investasi
PSAP No. 07	tentang Akuntansi Aset Tetap
PSAP No. 08	tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
PSAP No. 09	tentang Akuntansi Kewajiban
PSAP No. 10	tentang Koreksi Kesalahan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan
PSAP No. 11	tentang Laporan Keuangan Konsolidasi
PSAP No. 12	tentang laporan operasional

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, SAP Berbasis Akruaal adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Purwita (2013) berpendapat bahwa penerapan SAP ini memerlukan pemahaman yang baik dari setiap aparat yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan baik di Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah beserta instansi-instansi yang terkait didalamnya. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah wajib dilaksanakan, akan tetapi dalam penerapan tersebut perlu dipahami beberapa dasar pemikiran penting yang diharapkan dapat membantu penerapan SAP. Menurut hasil pemikiran tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemerintah dalam penerapan SAP berbasis akrual, yaitu (a) Regulasi, (b) Sistem dan sarana pendukung, (c) Sumber daya manusia

Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan keuangan yang dikordinasikan sedemikian rupa yang menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan". (Mulyadi, 2011:3), sedangkan menurut Departemen Dalam Negeri (2006:4) mengatakan bahwa Sistem Akuntansi adalah serangkaian prosedur (mekanisme) yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan". Sedangkan PP RI Nomor 56 Tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban daerah.

Informasi Keuangan Daerah (IKD) adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (IKD) (PP RI No. 56 Tahun 2005 : Pasal 1 ayat 16). Informasi Keuangan Daerah (IKD) yang disampaikan harus memenuhi prinsip – prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan (PP RI Nomor 56 Tahun 2005 : Pasal 3). Informasi Keuangan Daerah (IKD) yang disampaikan oleh daerah kepada pemerintah mencakup APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah, Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Informasi dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah disampaikan kepada Menteri Keuangan. Sedangkan Informasi yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri adalah dalam rangka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Keuangan (PP RI Nomor 56 Tahun 2005 : Pasal 2 ayat 2).

Pengertian akuntansi keuangan daerah menurut Halim (2009:34) menyatakan bahwa: Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak ekstern entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan".

Sedangkan didalam Kepmendagri No. 13 Tahun 2006 dalam pasal 23 ayat 1, mengemukakan: Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer".

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan

suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Badan Pengawasan Keuangan; Investor; Kreditor, dan donatur; Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah; Rakyat; Pemerintah Daerah lain; dan pemerintah pusat, yang semuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, meliputi (a) Pencatatan, bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*. Dengan menggunakan *cashbasis* selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan *accrual basis* untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah. (b) Penggolongan dan Pengikhtisaran, Adanya penjurnalan dan melakukan *posting* ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. (c) Pelaporan, setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, necara, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut oleh bagian keuangan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Pihak-pihak yang memerlukannya antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Badan Pengawasan Keuangan; Investor; Kreditor; dan donatur; Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah; Rakyat; Pemerintah Daerah lain; dan Pemerintah Pusat yang semuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah menjadikan variabel yang diteliti pada penelitian ini sebagai objek. Berikut daftar sejumlah penelitian yang relevan tersebut.

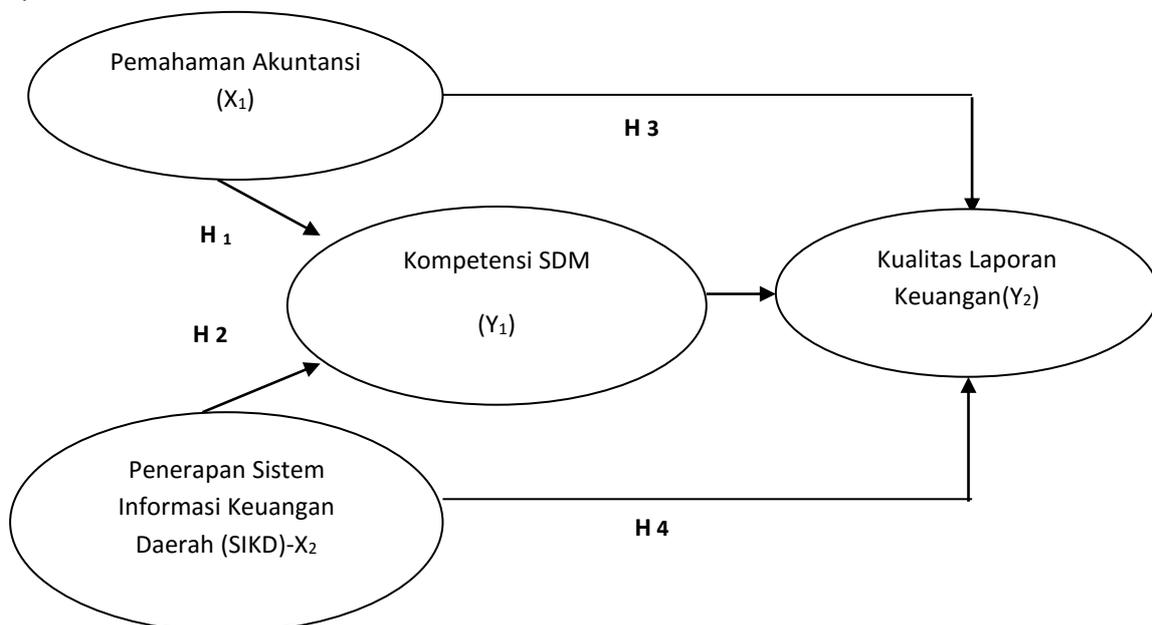
Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Metode Analisis
1	Silviana Dan Erwin Antoni, 2014	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Survey Pada Pemerintah Kabupaten Di Seluruh Jawa Barat	Penerapan Sistem Informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota pekanbaru karena sign < 0.05	Regresi Sederhana
2	M. Wahyuddin Abdullah, 2017	Pemoderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kab Bone	Kompetensi SDM dapat memoderisasi hubungan sistem pengendalian intern, penerapan SAP dan SIA.	Moderated Regression Analysis (MRA)
3	Ni Putu Yogi Merta Maeka Sari, I Made Pradana Adiputra, dan Edy Sujana, 2014	Pengaruh Pemahaman standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan daerah kualitas terhadap Laporan Keuangan Pemda (Studi Kasus Pada Dinas Di Pemerintahan Kab Jembrana)	Hasil dari Penelitian ini penunjukkan bahwa pemahaman Standar akuntansi pemerintahandan Penerapan Sistem informasi akuntansi berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah.	Regresi Berganda

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Metode Analisis
4	Rukmi Juwita, 2013	Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Propinsi Jabar.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi Akuntansi berpengaruh secara Positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	Regresi Berganda
5	Kusumah dan Arif.A, 2012	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)	Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan karena sign lebih kecil dari 0.05.	Regresi Berganda

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian terdahulu dimana ada keterkaitan antara Pemahaman Akuntansi, penerapan Standar Informasi Keuangan Daerah dan kompetensi sumber daya manusia akan dapat meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah maka penulis membuat kerangka pemikiran penelitian. Berikut adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Sumber : Data Olan, 2018

Gambar 1. Kerangka Pikir

Hipotesis

H₁ : terdapat pengaruh positif Pemahaman Akuntansi terhadap Kompetensi SDM pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Pekanbaru

H₂ : terdapat pengaruh penerapan sistem informasi keuangan daerah terhadap Kompetensi SDM pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Pekanbaru

- H₃ : terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan antara pemahaman Akuntansi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Pekanbaru
- H₄ : terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan antara penerapan sistem informasi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Pekanbaru.

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Jumlah OPD sebanyak 45 yang terdiri dari 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat Dewan, 1 Inspektorat, 7 Badan, 23 dinas dan 12 Kecamatan. Pengelola keuangan dimasing-masing OPD berjumlah 4 orang sehingga total populasi sebanyak 174 orang

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti). Teknik pengambilan sampel terhadap responden yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sub bagian pengelola keuangan yakni sebanyak 2 orang disetiap OPD, karena pengelola keuangan ini yang memiliki peranan penting dan tugas pokok fungsi serta yang bertanggung jawab dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah sehingga jumlah sampel keseluruhan dengan jumlah OPD sebanyak 45 menjadi 90 orang

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah penjabaran masing-masing variabel terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Dalam penelitian ini, indikator-indikator variabel tersebut antara lain sebagai berikut :

Tabel 4. Definisi Operasional

No	Variabel	Pengertian	Indikator	Skala
1	Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y ₂)	Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. PP 71, 2010	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami PP RI No. 71 Tahun 2010	Ordinal (Likert)
2	Kompetensi (Y ₁)	Kompetensi merupakan faktor mendasar yang dimiliki seseorang yang mempunyai kemampuan lebih, yang membuatnya berbeda dengan seseorang yang mempunyai kemampuan rata-rata atau biasa saja. Mangkunegara (2012:113)	1. Keterampilan 2. Pengalaman 3. Karakteristik Kepribadian 4. Motivasi 5. Kemampuan intelektual Wibowo (2014:283)	Ordinal (Likert)
3	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X ₁)	SAP merupakan persyaratan sekaligus menjadi pedoman yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia (PP No.71 thn 2010)	1. PSAP 1 2. PSAP 2 3. PSAP 3 4. PSAP 4 5. PSAP 5 6. PSAP 6 7. PSAP 7 8. PSAP 8 9. PSAP 9 10. PSAP 10 11. PSAP 11 12. PSAP 12 PP No.71 thn 2010	Ordinal (Likert)

4	Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (X ₂)	Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah organisasi formulir, catatan dan laporan keuangan yang dikordinasikan sedemikian rupa yang menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan(Mulyadi, 2011:3)	1. Cepat, mudah dan akurat 2. Proses akuntansi dan pelaporan 3. Memiliki computer yang cukup untuk melaksanakan tugas 4. Ketepatan waktu pelaporan 5. Pertanggungjawaban tepat waktu	Ordinal (Likert)
---	--	---	--	------------------

Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah (a) Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya dan langsung diberikan kepada pengumpul (Sugiyono, 2014:129). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari kuisisioner yang penulis sebarkan ke pihak – pihak yang terkait dalam OPD Kota Pekanbaru. (b) Data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, melainkan melalui orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2014:129) dalam bukunya Statistika Untuk Penelitian. Data ini umumnya berupa bukti – bukti, catatan, atau laporan historis.

Teknik Analisis Data

Uji Validitas

Sugiyono, (2014:267) dalam bukunya Statistika Untuk Penelitian, menyatakan uji validitas yaitu melakukan pengujian atas kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur.

Metode yang sering digunakan untuk mencari validitas instrument adalah korelasi produk moment antara skor setiap butir pernyataan dengan skor total sehingga disebut sebagai *Corrected Item-Total Correlation*. Validitas disini menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur data yang ingin diukur". Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan Valid bila koefisien $> 0,3$.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah untuk mengukur seberapa jauh responden memberikan jawaban yang konsisten terhadap kuisisioner yang diberikan. Kelayakan atau reliabilitas data diukur dari nilai croenbach alpha. Secara umum croenbach alpha lebih besar dari 0,6 menunjukkan adanya konsistensi dan apabila kurang dari 0.6 menunjukkan adanya tidak konsistensi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Sebelum dilakukan analisis maka dilakukan pengujian asumsi normalitas. Pada model penelitian ini pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan bantuan uji Kolmogorov-Smirnov Test. Normalnya masing masing variabel penelitian dapat diamati dari nilai *probability* yang dihasilkan, setiap variabel harus memiliki *probability* diatas atau sama dengan 0,05. Pengujian statistik lebih lanjut baru dapat dilaksanakan setelah seluruh variabel penelitian yang digunakan berdistribusi normal.

Uji Heterokedastisitas

Menurut Wijaya dalam Sarjono dan Julianita (2011:66) dalam bukunya SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar Aplikasi untuk Riset, heterokedastisitas menunjukkan bahwa varians tabel tidak sama untuk semua pengamat/observasi. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah terjadi homokedastisitas dalam model. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas menggunakan uji Glejser dimana Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: (1) H_0 : tidak ada gejala heteroskedastisitas. (2) H_a : ada gejala heteroskedastisitas. (3) H_0 diterima bila Signifikansi $> 0,05$ berarti tidak terdapat heteroskedastisitas dan H_0 ditolak bila Signifikansi $< 0,05$ yang berarti terdapat heteroskedastisitas..

Uji Multikorelasi

Uji Multikorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan di antara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi (gejala multikolinearitas) atau tidak. Multikorelasi adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang terjadi pada hubungan di antara variabel bebas. Multikorelasi dapat dilihat dari nilai VIF (*variance-inflating factor*). Jika $VIF < 10$, tingkat kolinearitas dapat ditoleransi (Sarjono dan Julianita, 2011:70).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Untuk menentukan nilai dL (*durbin lower*) dan dU (*durbin upper*) dengan melihat tabel durbin – Watson, pada $\alpha = 5\%$ dan $k = 2$ (nilai k menunjukkan nilai variabel bebas) dimana n merupakan jumlah responden. Keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut: (Sarjono dan Julianita, 2011:84). (1) Bila nilai DW berada diantara dU sampai dengan $4-dU$, koefisien korelasi sama dengan nol. Artinya tidak terjadi autokorelasi. (2) Bila nilai DW lebih kecil dari pada dL , koefisien korelasi lebih besar daripada nol, artinya terjadi autokorelasi positif. (3) Bila nilai DW lebih besar dari pada $4-dL$, koefisien korelasi lebih kecil daripada nol. Artinya terjadi autokorelasi negatif. (4) Bila nilai Dw terletak diantara $4-dU$ dan $4-dL$, hasilnya tidak dapat disimpulkan

Path Analysis/ Analisis Jalur

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur (*path analysis*) untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen) (Riduwan & Kuncoro, 2012:2). Model analisis jalur yang akan dipergunakan adalah model persamaan struktural dengan persamaan sebagai berikut (Sunnyoto, 2012:61):

$$Y_1 = \rho_{X_1 Y_1} X_1 + \rho_{X_2 Y_1} X_2 + \rho_{Y_1} \epsilon$$

$$Y_2 = \rho_{X_1 Y_2} X_1 + \rho_{X_2 Y_2} X_2 + \rho_{Y_1 Y_2} Y_1 + \rho_{Y_2} \epsilon$$

Dimana:

- X_1 : Pemahaman Akuntansi
- X_2 : Penerapan Sistem Informai Keuangan Daerah
- Y_1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia
- Y_2 : Kualitas Laporan Keuangan Daerah
- ϵ : Faktor-faktor lain

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel secara individu berpengaruh positif terhadap variabel terikat. Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. Untuk menentukan nilai t tabel, ditentukan tingkat signifikansi 5 % dengan derajat kebebasan $df = (N-k)$ dimana N adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel termasuk intersep dengan kriteria uji adalah jika t hitung $> t$ tabel ($\alpha, N-k$), maka hipotesis diterima. dan jika t hitung $< t$ tabel ($\alpha, N-k$), maka hipotesis ditolak.

Nilai t hitung diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan SPSS dan nilai t tabel diperoleh melalui rumus Microsoft Excel dengan formula $=TINV(\alpha, N-k)$, dengan contoh perhitungan sebagai berikut : jumlah sampel (n) = 84, jumlah variabel devenden dan indefenden (k) = 8, taraf signifikansi $\alpha = 5\%$, dan *degree of freedom* (df) = $n-k = 84-8=76(n$

adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel termasuk intersep) sehingga nilai t tabelnya dapat dihitung $=TINV(0.05,76)=1,992$.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji distribusi F, yaitu dengan membandingkan antara nilai kritis F (F_{tabel}) dengan nilai F_{hitung} yang terdapat pada tabel *Analysis of Variance*.

Untuk menentukan nilai F_{tabel} , tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df = (N-k)$ dan $(k-1)$ dimana N adalah jumlah observasi, k adalah variabel termasuk intersep. Kriteria yang digunakan adalah:

Jika $F_{hitung} > F_{tabel} (\alpha, k-1, N-k)$ dan $sign < 0,05$ maka hipotesis diterima.

Jika $F_{hitung} < F_{tabel} (\alpha, k-1, N-k)$ dan $sign > 0,05$, maka hipotesis ditolak.

Nilai F hitung diperoleh dari perhitungan SPSS dan Nilai F tabel diperoleh melalui Microsoft Excel dengan formula $=FINVV(\alpha, k-1, N-k)$ dengan contoh perhitungan sebagai berikut jumlah sampel (n) = 84, jumlah variabel devenden dan indefenden (k) = 8, taraf signifikansi $\alpha = 5\%$, dan *degree of freedom* ($df1$)= $K-1=8-1=7$, *degree of freedom* ($df2$) = $n-k = 84-8=76$ (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel termasuk intersep) sehingga nilai F tabelnya dapat dihitung formula $=FINV(0,05;7;76) = 2,133$

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Kompetensi responden dengan rata-rata sebesar 4,122 dimana pernyataan ini dapat dikategorikan setuju, Kualitas Laporan Keuangan responden dikategorikan setuju dengan rata-rata sebesar 4,118 dikategorikan setuju,

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan rata-rata sebesar 4,218 dimana pernyataan ini dapat dikategorikan sangat setuju, Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan rata-rata sebesar 4,107 dimana pernyataan ini dapat dikategorikan setuju

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Data yang diperoleh melalui instrumen pengumpul data harus mempunyai tingkat akurasi yang tinggi, sehingga instrument penelitian yang digunakan harus valid. Menurut Sugiyono (2014:86), jika nilai validitas tiap butir pernyataan lebih besar dari 0,30, maka butir-butir pernyataan dari instrumen dianggap sudah valid

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan semua item pernyataan untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (Y_1), variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y_2), variabel Pemahaman Akuntansi (X_1) dan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (X_2) mempunyai nilai korelasi (*corrected item totalcorrelation*) $> 0,30$ dengan demikian berarti item-item pernyataan pada variabel valid untuk pengujian selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas berguna untuk menunjukkan konsistensi hasil pengukuran. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach's Alpha*. Jika nilai suatu variabel memiliki *Cronbach's Alpha* $> 0,6$, maka variabel tersebut dikatakan reliabel (Ghozali, 2012 : 78)

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan semua item pernyataan untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y_2), Kompetensi Sumber Daya Manusia (Y_1), Pemahaman Akuntansi (X_1) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (X_2) mempunyai nilai dengan *Cronbach's Alpha* $> 0,60$, dengan demikian pengukuran dapat dikatakan hasil ukuran terpecaja (*reliabel*) sehingga ukuran dapat diandalkan dan ini berarti pernyataan-pernyataan yang diajukan melalui angket memiliki keterkaitan.

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Untuk memastikan akuratnya prediksi asumsi normalitas, maka dilakukannya uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji ini mensyaratkan nilai signifikansi residual lebih besar dari 0,05 agar suatu distribusi residual dianggap normal. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa data bersifat normal dengan kriteria nilai *Kolmogorov-Smirnov* dengan nilai signifikansi (p) lebih besar dari 0.05, maka diketahui bahwa data variabel dengan jumlah sampel sebanyak 90 adalah normal atau memenuhi syarat uji normalitas. Dengan demikian, syarat pertama dalam melakukan pengujian hipotesis sudah terpenuhi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil dari Uji Heteroskedastisitas dapat ditunjukkan dengan Uji Glejser dimana hasil penelitian didapat Kompetensi SDM (Y_1), Pemahaman Akuntansi (X_1) dan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (X_2) mempunyai nilai sign diatas 0.05 berarti H_0 diterima (tidak terjadi heteroskedastisitas) dan H_a ditolak.

Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil perhitungan nilai *Tolerance* pada tabel di atas menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antara variabel yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi

Hasil Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah pada suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Metode regresi yang baik adalah tidak terdapat autokorelasi. Berdasarkan uji *Durbin Watson* yang dilakukan, diperoleh nilai DW sebesar 1,819. Sedangkan dari tabel DW dengan tingkat signifikansi 0.05 dan jumlah data (n)=90 k=4 diperoleh nilai DU sebesar 1,751. Karena nilai DW sebesar 1,819 nilai tersebut telah memenuhi persyaratan tidak terjadinya autokorelasi bahwa $DU < DW < 4 - DU$ ($1,751 < 1,819 < 2,249$).

Path Analysis/ Analisis Jalur

Analisis Jalur Sub Struktur Pertama

Tabel 5. Analisis Jalur Substruktur Pertama

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	-1.526	2.455	
X ₁	.256	.049	.447
X ₂	.448	.103	.373

$r_{12} = 0.441$
 R Square = 0.486
 F = 41.107 Sign = 0.000

Sumber : Data Olahan, Hasil Output SPSS 21, 2018

Berdasarkan hasil analisis sub struktur pertama yang diperoleh dari *Standardized Coefficient B*, Maka dapat diperoleh :

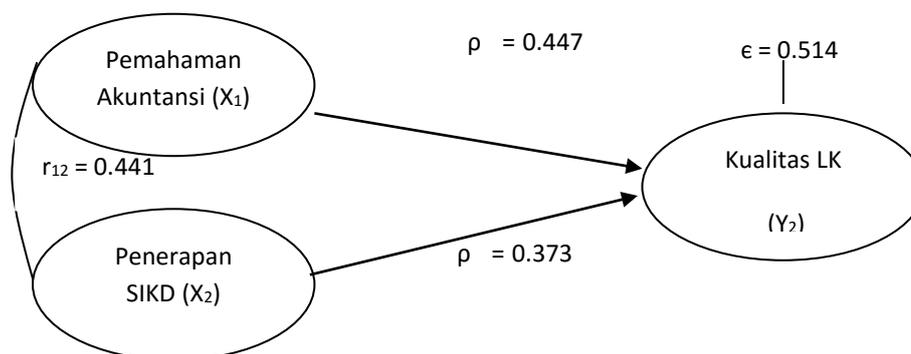
$$Y_1 = 0.447X_1 + 0.373X_2 + 0.514e$$

Keterangan hasil persamaan analisis jalur sub struktur pertama (1) Variabel Pemahaman Akuntansi- X_1 mempunyai arah positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, nilai koefisien jalur menunjukkan sebesar 0.447 berarti apabila variabel Pemahaman Akuntansi meningkat 1 satuan dengan menganggap faktor lain tetap, maka akan meningkatkan Kompetensi SDM pegawai OPD Kota Pekanbaru sebesar 0.447.

(2) Variabel Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah- X_2 mempunyai arah positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, nilai koefisien jalur menunjukkan sebesar 0.373 berarti apabila variabel Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah meningkat 1 satuan dengan menganggap faktor lain tetap, maka meningkatkan Kompetensi SDM OPD Kota Pekanbaru sebesar 0.373.

(3) Nilai $e_1 = (1 - R^2) \rightarrow (1 - 0.486) = 0.514 \times 100\% = 51,4\%$ yang berarti bahwa kemampuan variabel Pemahaman Akuntansi dan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel keterlibatan sebesar 48,6% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Akuntansi dan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah memiliki pengaruh dalam penelitian ini.

(4) Pada pengujian Simultan dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan $sig < 0.05$, maka berdasarkan hasil SPSS pada tabel 5 didapat hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan $Sign < 0.05$ ($41,107 > 3.101$ dan $0.000 < 0.05$) berarti semua variabel independen (Pemahaman Akuntansi dan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah) dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Kompetensi SDM).



Sumber : Data Olahan, 2018

Gambar 2. Hubungan Sub struktur X_1 , X_2 dan Y_1

Analisis Jalur Sub struktur Kedua

Tabel 6. Analisis Jalur Sub Struktur Kedua

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	-2.370	1.400	
	X ₁	.599	.061	.627
	X ₂	.125	.032	.229
	Y ₁	.209	.065	.182
R Square =		0.820		
F =		130.461	Sign = 0.000	

Sumber : Data Olahan, Hasil Output SPSS 21, 2018

Berdasarkan hasil analisis jalur sub struktur kedua yang diperoleh dari *standardized Coefficient B*, Maka dapat diperoleh :

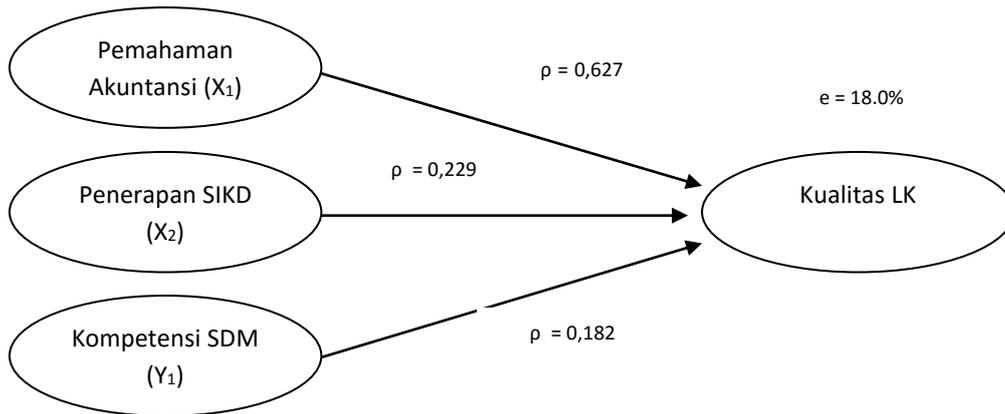
$$Y = 0,627X_1 + 0.229X_2 + 0.182 Y_1 + 0.18\epsilon$$

Keterangan hasil persamaan Analisis jalur sub struktur kedua (1) Variabel Pemahaman Akuntansi (X₁) mempunyai arah positif terhadap Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru, nilai koefisien jalur menunjukkan sebesar 0.627 berarti apabila variabel Pemahaman Akuntansi meningkat 1 satuan dengan menganggap faktor lain tetap, maka akan meningkatkan Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru sebesar 0.627.

(2) Variabel Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (X₂) mempunyai arah positif terhadap Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru, nilai koefisien jalur menunjukkan sebesar 0.229 berarti apabila variabel Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah meningkat 1 satuan dengan menganggap faktor lain tetap, maka akan meningkatkan Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru sebesar 0.229.

(3) Variabel Kompetensi SDM Kerja (Y₁) mempunyai arah positif terhadap Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru, nilai koefisien menunjukkan sebesar 0.182 berarti apabila variabel Kompetensi SDM meningkat 1 satuan dengan menganggap faktor lain tetap, maka akan meningkatkan Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru sebesar 0.182.

(4) Nilai $e_1 = (1 - R^2) \rightarrow (1-0.820) = 0.180 \times 100\% = 18.0\%$ yang berarti bahwa kemampuan variabel Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kompetensi SDM dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel keterlibatan sebesar 82.0% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Hasil ini menunjukkan bahwa Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kompetensi SDM memiliki pengaruh yang dalam penelitian ini. (5) Pada pengujian Simultan dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan $sig < 0.05$, maka berdasarkan hasil SPSS pada tabel 6 didapat hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan $Sign < 0.05$ ($130.461 > 3.101$ dan $0,000 < 0.05$) berarti semua variabel independen (Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kompetensi SDM) dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru)

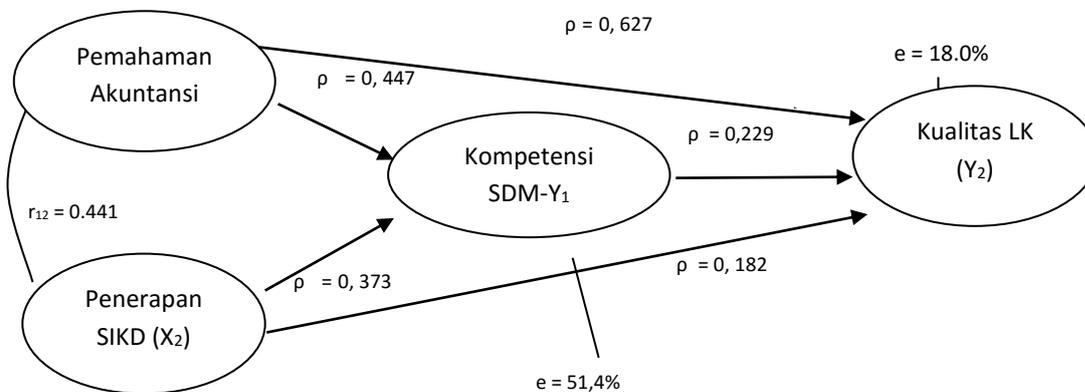


Sumber : Data Olahan, 2018

Gambar 3. Hubungan Sub struktur Variabel X₁, X₂, Y₁ dan Y₂

Model Akhir Analisis Jalur

Analisis jalur dilakukan untuk menentukan besar kontribusi langsung dan tidak langsung dari variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah melalui Kompetensi SDM. Model analisis jalur akhir yang didapatkan melalui perhitungan analisis jalur, setelah diseleksi jalur positif dan signifikan yang disesuaikan dengan hipotesis yang peneliti ajukan dan dengan mengkombinasikan hasil pengujian analisis jalur sub struktur pertama dan kedua maka dapat digambarkan diagram jalur sebagaimana gambar berikut:



Sumber : Data Olahan, 2018

Gambar 4 Hubungan Kausal Empiris Variabel X₁, X₂, Y₁ dan Y₂

Penjelasan diagram pada Gambar 3 dapat diuraikan sebagai berikut (1) Kontribusi langsung dan tidak langsung variabel Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru. a. Besar kontribusi langsung variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kompetensi SDM adalah $0.447^2 \times 100\% = 19,98\%$. b. Besar kontribusi langsung variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah $0.627^2 \times 100\% = 39,31\%$. c. Besar kontribusi tidak langsung Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru melalui Kompetensi SDM adalah $0.447 \times 0.229 = 0.102$. Sehingga kontribusi total variabel

Kompetensi SDM terhadap variabel Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru adalah $0.447 + 0.102 = 0.549$.

(2) Kontribusi langsung dan tidak langsung variabel Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru a. Besar kontribusi langsung variabel Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kompetensi SDM adalah $0.373^2 \times 100\% = 13.91\%$. b. Besar kontribusi langsung variabel Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru adalah $0.182^2 \times 100\% = 3.31\%$. c. Besar kontribusi tidak langsung Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru melalui Kompetensi SDM Kerja adalah $0.373 \times 0.229 = 0.085$. Sehingga kontribusi total variabel Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap variabel Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru adalah $0.373 + 0.085 = 0.458$.

(3) Kontribusi langsung variabel Kompetensi SDM terhadap variabel Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru adalah sebesar $0,229^2 \times 100\% = 5,24\%$. Hasil ini mencerminkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru. Temuan ini sekaligus menguatkan argumentasi mengapa variabel Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru..

Uji Hipotesis

Untuk membuktikan hipotesis benar secara parsial digunakan uji t, yaitu untuk menguji keberartian koefisien Jalur secara parsial dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} pada tingkat Sign = 0.05, apabila hasil perhitungannya menunjukkan (a) $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variasi variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat dan terdapat pengaruh di antara kedua variabel yang diuji, b. $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variasi variabel bebas tidak dapat menerangkan variabel terikat dan terdapat pengaruh antara dua variabel yang diuji.

Tabel 7. Hasil Uji t Sub Struktur Pertama

Model	Standardized	T	Sig.
	Coefficients		
Beta			
1 (Constant)		-.622	.536
X1	.447	5.222	.000
X2	.373	4.354	.000

Sumber: Data Olahan, Hasil Output SPSS 21, 2017

H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Pemahaman Akuntansi Terhadap Kompetensi SDM pada OPD Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hipotesa ini dapat disimpulkan bahwa Variabel Pemahaman Akuntansi (X_1) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kompetensi SDM (Y_1) karena $t_{hitung} = 5.222 > t_{tabel} 1.986$ dengan probabilitas (sign) $0.000 < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan Pemahaman Akuntansi terhadap Kompetensi SDM pada OPD Kota Pekanbaru. Ini berarti penelitian ini menerima hipotesis yang menyatakan Pemahaman Akuntansi berpengaruh terhadap Kompetensi SDM Pada OPD Kota Pekanbaru. Faktor Pemahaman Akuntansi dalam penelitian ini terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempengaruhi Kompetensi SDM.

Dengan demikian kontribusi dari variabel Pemahaman Akuntansi terhadap Kompetensi SDM OPD Kota Pekanbaru yang mencapai 44.7%. Hubungan dan pengaruh yang signifikan ini memberi arti bahwa tingkat Pemahaman Akuntansi meningkat maka Kompetensi SDM OPD Kota Pekanbaru juga cenderung meningkat pula, demikian sebaliknya bila Pemahaman Akuntansi menurun maka Kompetensi SDM OPD Kota Pekanbaru cenderung menurun.

H₂ : Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kompetensi SDM pada OPD Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hipotesa ini dapat disimpulkan bahwa Variabel Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (X₂) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kompetensi SDM (Y₁) karena $t_{hitung} = 4.354 > t_{tabel} = 1.986$ dengan probabilitas (sig ρ) $0.000 < 0.05$, maka H₀ ditolak dan H₂ diterima. Ini berarti penelitian ini menerima hipotesis yang menyatakan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kompetensi SDM Pada OPD Kota Pekanbaru. Faktor Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam penelitian ini terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempengaruhi Kompetensi SDM.

Dengan demikian kontribusi dari variabel Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru yang mencapai 37.3%. Hubungan dan pengaruh yang signifikan ini memberi arti bahwa tingkat Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah meningkat maka Kompetensi SDM OPD Kota Pekanbaru juga cenderung meningkat pula, demikian sebaliknya bila Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah menurun maka Kompetensi SDM OPD Kota Pekanbaru cenderung menurun.

H₃ : Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru dengan Kompetensi sebagai variabel Moderating

Tabel 8. Hasil Uji t Sub Struktur Kedua

Model	Standardized	t	Sig.
	Coefficients		
Beta			
1 (Constant)		-1.693	.094
X ₁	.627	9.820	.000
X ₂	.229	3.915	.000

Sumber: Data Olahan, Hasil Output SPSS 21, 2018

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan Variabel Pemahaman Akuntansi (X₁) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru karena $t_{hitung} = 9.820 > t_{tabel} = 1,986$ dengan probabilitas (sig ρ) $0.000 < 0,05$, maka H₀ ditolak dan H₃ diterima. Ini berarti penelitian ini menerima hipotesis yang menyatakan Pemahaman Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru. Faktor Pemahaman Akuntansi dalam penelitian ini terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempengaruhi Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru. Kontribusi dari variabel Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru yang mencapai 62.7%, Ini berarti bahwa tingkat Pemahaman

Akuntansi meningkat maka Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru juga cenderung meningkat pula, demikian sebaliknya bila Pemahaman Akuntansi menurun maka terhadap Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru cenderung menurun.

H₄ : Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru dengan Kompetensi sebagai variabel Moderating.

Berdasarkan hasil uji t dapat dilihat pada tabel 8 dengan menggunakan metode SPSS, maka dapat disimpulkan Variabel Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (X₂) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru karena $t_{hitung} = 3.915 < t_{tabel} 1.986$ dengan probabilitas (sig *p*) $0.000 < 0,05$, maka H₀ ditolak dan H₄ diterima. Ini berarti penelitian ini menerima hipotesis yang menyatakan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru dengan kompetensi SDM sebagai variabel *moderating*. Faktor Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam penelitian ini terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempengaruhi Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kompetensi SDM

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pemahaman Akuntansi (Standar Akuntansi Pemerintahan) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kompetensi SDM. Pemahaman Akuntansi yang ada di OPD Kota Pekanbaru berada dalam kategori sangat setuju dari semua indikator dengan nilai rata-rata 4,218. Hasil ini mengindikasikan bahwa Pemahaman Akuntansi merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dalam rangka meningkatkan Kompetensi SDM Kota Pekanbaru.

Pemahaman Akuntansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kompetensi SDM. Hal ini dapat dilihat dari uji t (uji parsial) dimana nilai t hitung $> t$ tabel, ($5,222 > 1,986$) dan signifikansinya $0,000 < 0,05$, maka hipotesis yang menyatakan ada pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kompetensi SDM dapat diterima. Ini berarti semakin baik Pemahaman Akuntansi seseorang maka akan berakibat pada semakin meningkat Kompetensi SDM tersebut atau begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan penelitian Abdullah (2017) dimana hasilnya terdapat pengaruh positif dan signifikan Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Bone

Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kompetensi SDM

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kompetensi SDM. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang ada di OPD Kota Pekanbaru berada dalam kategori setuju dari semua indikator dengan nilai rata-rata 4,107. Hasil ini mengindikasikan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dalam rangka meningkatkan Kompetensi SDM Kota Pekanbaru.

Sistem Informasi Keuangan Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kompetensi SDM. Hal ini dapat dilihat dari uji t (uji parsial) dimana nilai t hitung $> t$ tabel, ($4,354 > 1,986$) dan signifikansinya $0,00 < 0,05$, maka hipotesis yang menyatakan ada pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kompetensi SDM dapat diterima. Ini berarti semakin baik Sistem Informasi Keuangan Daerah maka akan berakibat pada semakin meningkat Kompetensi SDM tersebut atau begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan penelitian Abdullah (2017) dimana hasilnya terdapat pengaruh positif dan signifikan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Bone .

Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru dengan Kompetensi sebagai variabel Moderating.

Berdasarkan hasil statistik menunjukkan bahwa Kompetensi SDM memoderasi hubungan antara Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan, dimana Kompetensi SDM memperkuat pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan karena t hitung $>$ t tabel, ($9,820 > 1,986$) dan signifikansinya $0,00 < 0,05$, maka hipotesis yang menyatakan ada pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Kompetensi SDM sebagai variabel moderasi dapat diterima. Hal ini sesuai dengan penelitian Hal ini sesuai dengan penelitian Abdullah (2017) dimana hasilnya terdapat pengaruh positif dan signifikan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas laporan Keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Bone. Beberapa penelitian menunjukkan hasil mengenai pengaruh langsung kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan, seperti dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Angraeni (2014) bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Siduarjo. Hal ini berarti jika SDM keuangan atau akuntansi berkompeten maka laporan keuangan daerah yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan pengaruh langsung Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dikemukakan oleh Kusumah dan Arif (2012) yang mengemukakan bahwa Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Jadi setiap pegawai yang berperan dalam pembuatan atau penyusunan laporan keuangan mampu memahami SAP dengan baik serta memiliki kompetensi yang baik maka kualitas laporan keuangan akan lebih baik jika dibandingkan hanya memahami Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan keuangan OPD Kota Pekanbaru dengan Kompetensi sebagai variabel Moderating.

Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa kompetensi SDM juga mampu memoderasi hubungan antara Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dalam hal ini kemampuan SDM mampu memperkuat variabel Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah karena karena t hitung $>$ t tabel, ($3,915 > 1,986$) dan signifikansinya $0,00 < 0,05$, maka hipotesis yang menyatakan ada pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Kompetensi SDM sebagai variabel moderasi dapat diterima. Hal ini sesuai dengan penelitian Abdullah (2017) yang menjelaskan bahwa Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah menggunakan kompetensi SDM sebagai variabel moderasi . pengaruh langsung Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, berdasarkan penelitian Silviana dan Antoni (2014) dan Juwita (2013) menunjukkan bahwa Penerapan SIKD berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Jadi penerapan SIKD dengan kompetensi SDM yang baik akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas jika dibandingkan dengan hanya menerapkan SIKD. Hal ini dikarenakan dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka peranan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan organisasi akan berjalan dengan baik atau apa yang dibebankan kepada sumber daya tersebut dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara profesional, efektif dan efisien.

Jika kompetensi sumber daya manusianya baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dengan demikian kompetensi sumber daya manusia ditunjukkan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dapat diterapkan.

Jadi dengan adanya kompetensi sumber daya manusia dapat diketahui apakah suatu pemerintahan telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional, efektif, dan efisien. Sehingga dengan adanya kompetensi sumber daya manusia mendorong terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas yang bebas dari salah saji material dan pengertian yang menyesatkan. Jadi karena hasil pengujian menunjukkan nilai yang mendukung hipotesis keempat sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis keempat (H4) diterima

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada OPD Kota Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Hipotesis pertama penelitian ini diterima, yaitu bahwa Pemahaman Akuntansi (Standar Akuntansi Pemerintahan) berpengaruh signifikan terhadap Kompetensi SDM. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Jadi semakin memahami pegawai atau aparatur keuangan tentang standar akuntansi pemerintahan maka kompetensi SDM akan lebih baik dan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik. (2) Hipotesis kedua penelitian ini diterima, yaitu bahwa penerapan SIKD berpengaruh signifikan terhadap Kompetensi SDM. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi SDM. Jadi Penerapan SIKD yang baik mampu meningkatkan kompetensi SDM dan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru. (3) Hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima, yaitu bahwa kompetensi SDM memoderasi hubungan antara pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan metode *Path Linear* menunjukkan bahwa kompetensi SDM berhasil memberikan nilai tambah kepada pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jadi pemahaman mengenai standar akuntansi pemerintahan dibarengi dengan kompetensi SDM yang baik akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas dibandingkan jika hanya memahami standarnya saja. (4) Hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima, yaitu bahwa kompetensi SDM memoderasi hubungan antara pengaruh Penerapan SIKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi SDM merupakan variabel moderasi dimana kompetensi SDM berhasil memberikan nilai tambah kepada pengaruh Penerapan SIKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Jadi Penerapan SIKD yang baik didukung dengan kompetensi SDM yang baik akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas jika dibandingkan hanya Penerapan SIKD saja.

Adapun saran-saran yang diberikan penulis berdasarkan hasil analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut : (1) Variabel Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Variabel Kompetensi SDM, dimana secara parsial hasil penelitian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan hal tersebut pimpinan di setiap OPD Kota Pekanbaru agar selalu bisa meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas melalui pelatihan dan pendidikan yang tepat dan berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan keuangan dan akuntansi, secara konsisten memaksimalkan Penerapan Sistem informasi keuangan daerah secara efektif. OPD kota Pekanbaru juga perlu mengimplementasikan SAP secara tepat dan lengkap dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga opini BPK untuk Kota Pekanbaru Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bisa menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ditahun-tahun berikutnya. (2) Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, penelitian selanjutnya diharapkan menyempurnakan dan memperkuat hasil penelitian ini dengan memperluas area penelitian. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama juga dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini masih dapat ditingkatkan dengan adanya

penambahan variabel bebas seperti Sistem pengendalian intern, teknologi informasi, rekonsiliasi, peran PPK-SKPD dan lainnya

Keterbatasan penelitian dapat disampaikan sebagai berikut : (1) Ruang lingkup penelitian hanya dilakukan pada Pemerintah Kota Pekanbaru dikarenakan proses perijinan yang sedikit rumit dan menghabiskan banyak waktu.. (2) Pengumpulan data ditekankan pada penyebaran kuesioner yang bersifat sesaat sehingga sangat terbatas untuk mendapatkan informasi lebih dalam kondisi riil di OPD. (3) Data yang diperoleh dari kuesioner sangat tergantung pada asumsi responden menjawab dengan jujur. (2) Variabel bebas yang dimasukkan dalam penelitian ini masih terbatas, tidak semua isu yang menjadi *trend* topik terkait kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. (3) Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk pemerintah daerah yang lain

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. Wahyuddin. (2014). *Pemoderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bone*, Jurnal Akuntansi Peradaban : Vol. III No. 2, UIN Alauddin, Makassar
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2015). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015*. www.bpk.go.id.
- Departemen Dalam Negeri. (2006). *Konsep Panduan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*
- Desiana, Kadek Wati. (2014) *Pengaruh Kompetensi SDM, Peneraan SAP dan Sistem Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*, e-journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol.2, No.1
- Fuad, Noor dan Ahmad, Gofur. (2009) *.Integreted Human Resources Development*. PT Grasindo, Jakarta.
- Ghazali, Imam. (2012). *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. (2008). *Kompetensi Komunikasi Plus: Teori, Desain Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ihsanti, Emilda. (2014) *Pengaruh Kompetensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*, Universitas Negeri Padang, Padang.
- Juwita, Rukmi. (2013). *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal Trikonomika. Vol. 12 No. 2.
- Kusumah, Arif Ardi. (2012) . *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya*. Jurnal Akuntansi. Vol.1 No.3.
- Mahaputra, I Putu Upa bayu Rama. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Bali
- Manopo, Christine. (2011) . *Competency Based Talent and Performance Management System*. Salemba Empat. Jakarta
- Mardiasmo. (2008) *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta
- Miller, Rankin and Neathey. (2001). *Competency Framerwork in UK Organization*, CIPD, London
- Mulyadi. (2012). *Sistem Akuntansi*, BPFE, Yogyakarta
- Nasrudin. (2010). *Psikologi Manajemen*, CV Pustaka Setia, Bandung
- Ni Putu Yogi, Merta Maeka Sari, I Made, Pradana Adiputra, dan Edy Sujana. (2014). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan daerah Kualitas terhadap Laporan Keuangan*

- pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas Di pemerintah Kabupaten Jembrana), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi,*
- Nurillah, As syfa . (2014). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok), Universitas Diponegoro, Semarang*
- Noviantika. (2016). *Pengaruh kompetensi dan penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah kota Pekanbaru, Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru*
- Pradono, Febrian Cahyo dan Basukianto. (2015). *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah), Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Universitas Stikubang, Semarang*
- Sekaran, Uma. (2008). *Research Methods For Business : Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Buku 2. Salemba Empat : Jakarta*
- Silviana dan Erwin Antoni. (2014). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Survey Pada Pemerintah Kabupaten Di Seluruh Jawa Barat, Jurnal Provita, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung*
- Subana, M. Dan Sudrajat. (2011). *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah. CV Pustaka Pelajar, Bandung*
- Sugiyono. (2014) . *Statistika Untuk Penelitian. Alfabeta. Bandung*
- Sulistiyani, Ambar Teguh dan Rosidah. (2009). *Manajamen Sumber Daya manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu*
- Sukmaningrum, Tantriani, dan Harto. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Semarang), Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang*
- Sutrisno, Edy. (2009). *Budaya Organisasi. Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Penerbit Kencana, Jakarta.*
- Thoha, M. (2008). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasi. Raja Grafindo Persada. Jakarta*
- Umar. Husein. (2008). *Manajemen Riset dan Perilaku Konsumen. PT. Gramedia Pusat, Jakarta*
- Usmara, A, (2012), *Strategi Baru Manajemen Pemasaran, Amoro Book, Jakarta*
- Wibowo, (2011), *Manajemen Kinerja, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.*
- Yunirasih, Tjutju dan Suwatno. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Alfabeta, Bandung*
- Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
- Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002 pada Pasal 70: ayat 1, tentang *pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah*
- _____, No. 13 Tahun 2006 dalam pasal 23 ayat 1, *Sistem akuntansi pemerintahan daerah*
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- _____, Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta*
- _____, Nomor 65 Tahun 2010 *Sistem Informasi Keuangan Daerah. Jakarta*
- _____, Nomor 8 Tahun 2006 *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta*
- Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara,*
- _____, No. 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*